

"Tema: 5 (Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM)

**AKTOR PENGGIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERBATASAN
PESISIR BERBASIS EKOWISATA**

Toto Sugito, Ahmad Sabiq, Muslih Faozanudin dan Bambang Kuncoro
FISIP Universitas Jenderal Soedirman
totomyounsoed@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan di wilayah perbatasan pesisir menjadi prioritas penting untuk mengatasi kesenjangan dan konflik sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan. Tujuan penelitian untuk membuat model pemberdayaan masyarakat perbatasan pesisir berbasis ekowisata. Menggunakan metode penelitian kualitatif Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, analisis dokumentasi, Focus Group Discussion (FGD) dan Participatory Decision Making (PDM). Lokasi penelitian di daerah perbatasan yaitu Desa Sebus dan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Informan penelitian dengan purposif sampling, diantaranya aktivis penggiat pemberdayaan, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelompok usaha, akademisi, dan wisatawan. Data penelitian di analisis menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan (1) Membutuhkan program pemberdayaan secara partisipatif dan berkesinambungan untuk mengembangkan potensi ekowisata hutan mangrove dan pengolahan bahan makanan dari buah mangrove, penangkaran penyu, serta wisata pantai. (2) Aktivis pemuda menjadi penggiat pemberdayaan ekowisata dengan tokoh masyarakat membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah desa dan daerah, serta pihak swasta. (3) Membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan listrik dan sinyal telekomunikasi khususnya di Desa Temajuk supaya tidak menimbulkan ketergantungan dan kecemburuan sosial dan ekonomi dengan daerah perbatasan Malaysia.

Kata kunci: desa perbatasan pesisir, ekowisata, partisipatif, pembangunan, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi pondasi, pendukung serta penentu pembangunan bagi daerah, perkotaan, bahkan bangsa dan negara, karena desa merupakan realitas kehidupan masyarakat yang memiliki banyak potensi, menyediakan dan mengirim kebutuhan pokok, baik dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta menjadi lokasi pariwisata. Jika pembangunan desa dan masyarakatnya tidak mampu memberdayakan potensinya dan meningkatkan produktivitasnya maka terjadi permasalahan seperti urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan serta desa ditinggalkan masyarakatnya untuk pergi menjadi

buruh migran keluar negeri. Semangat membangun desa merupakan perwujudan konsep-konsep pembangunan yang ideal yaitu pembangunan partisipatif, demokratis, berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan. Menurut Luthfia (2013) pembangunan di desa merupakan penentu dan sangat penting dalam menentukan pembangunan di perkotaan. Sulaiman *et al.* (2017) menegaskan, pembangunan di desa menjadi pondasi dan menentukan dalam keberhasilan pembangunan di daerah dan nasional, karena desa memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Pentingnya pembangunan desa termasuk di daerah perbatasan dan pesisir menjadi salah satu bidang kajian dan program penting khususnya dalam rangka menjaga kedaulatan, rasa nasionalisme dan keadilan dengan mempercepat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penting dan strategisnya pembangunan wilayah perbatasan, karena hakekatnya pembangunan perbatasan dan pesisir merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa kawasan perbatasan digolongkan pada kawasan strategis, yang penataan ruangnya diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 13 bahwa pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Penjelasan pasal tersebut adalah "kawasan yang bersifat khusus dan strategis" seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Berdasarkan hasil penelitian Syamwil *et al.* (2005) dari kelompok keahlian perumahan dan permukiman departemen arsitektur Institut Teknologi Bandung Tahun 2005, bahwa pengembangan wilayah tertinggal (*periphery*) khususnya dengan melihat perbatasan sebagai wilayah potensial sebagai faktor pendorong pertumbuhan perekonomian yang berbasis kepada pemanfaatan hubungan yang saling menguntungkan antar negara dalam suasana damai. Menurut Patriadi (2010) daerah perbatasan memiliki keunikan tersendiri, ditinjau dari aspek geografis, sosial, dan kultural. Sehingga pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan kebijakan yang menyeluruh, karena bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua Negara serta

akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan peningkatan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Sholihah (2016) menyatakan, kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Namun pembangunan di daerah perbatasan dan pesisir masih memiliki tantangan dan permasalahan seperti beberapa hasil riset dari Widiati (2007) menjelaskan, bahwa penanganan kawasan perbatasan antarnegara lebih banyak permasalahannya dibanding pencapaian kemajuan pembangunan, seperti adanya kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua negara, berupa jaringan jalan transportasi darat, telekomunikasi, listrik, informasi, dan infrastruktur lainnya.

Kemudian gangguan hubungan bilateral di berbatasan terkait aspek keamanan dan politis maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas negara di darat dan laut. Kemudian berdasarkan laporan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat tahun 2016 bahwa kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dari negara tetangga, seperti Sarawak Malaysia yang mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.

Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal (Sutisna *et al.* 2010). Dalam proses perencanaan, salah satu permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan belum tersedia rencana pembangunan yang berorientasi kepada upaya pembangunan kawasan perbatasan terintegrasi dan terperinci (Bappenas-BNPP, 2010). Wilayah perbatasan umumnya merupakan daerah tertinggal dengan kondisi rawan baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Fenomena yang sangat menonjol adalah maraknya kegiatan *illegal logging*, *illegal trading*, arus migrasi ilegal (*illegal trafficking*), serta bergesernya patok-patok pembatas antar negara (Idris & Sijabat 2011). Masyarakat perbatasan, umumnya miskin dan secara ekonomi lebih berorientasi ke negara tetangga—dengan melakukan migrasi temporer maupun permanen dengan motif utama ekonomi, sebagaimana hal itu terjadi di sepanjang

kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak (Arifin 2011). model kebijakan pembangunan yang digunakan pemerintah kurang relevan dengan karakteristik kawasan diantaranya, kultur birokrasi yang masih sektoral, lemahnya wewenang badan pengelola perbatasan inkonsistensi kebijakan teknis dengan paradigma pembangunan perbatasan, serta faktor kondisi geografis yang terisolir memerlukan penanganan yang *extra-ordinary* (Arifin 2013) Kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan relatif masih tertinggal, belum meningkatkan kesejahteraan dan terjadi kesenjangan dengan negara tetangga, hal ini karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan belum sesuai dengan potensi sumber daya yang ada (Gevisioner *et al.* 2013) & (Sholihah 2016). Masyarakat pesisir terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan. kesejahteraan nelayan semakin memprihatinkan karena semakin berkurangnya target *fishing* bahkan sudah sampai pada *over fishing*, dan menyempitnya *fishing ground*, tetapi kebutuhan hidup semakin tinggi, serta rusaknya lingkungan perairan serta ekosistemnya rusak baik ulah manusia maupun bencana alam (Indarti & Wardana, 2013). Masyarakat disekitar pesisir pantai mengalami keterpurukan, karena belum dapat mengelola sumber daya pantai secara optimal dan masih minimnya sentuhan pengetahuan akan pemanfaatan pengembangan Sumber daya di wilayah pesisir pantai, serta tidak mengenal cara lain yang lebih efektif dan inovatif untuk mengelola sumber daya pantai yang mereka hasilkan (Kristianti 2016) menegaskan.

Hasil penelitian penulis tahun 2018 bahwa masyarakat di perbatasan seperti di Desa Sebus dan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, masih kurang memiliki keasadaran dan kemampuan untuk mengolah potensi sumber daya baik sumber daya alam atau lingkungan khususnya perkebunan, pantai dan pariwisata. Infrastruktur akses jalan dan jembatan yang masih kurang bagus, jika terjadi hujan maka tidak bisa dilewati kendaraan karena rusak berlubang dan masih tanah yang belum di aspal.

Berdasarkan latar belakang tentang pentingnya pembangunan di desa khususnya daerah perbatasan dan pesisir serta permasalahan yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk membuat model pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan pesisir berbasis

ekowisata tepatnya di Desa Sebus dan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), menurut Daniel *et al.* (2008) PRA merupakan pemahaman pedesaan berdasarkan perantara secara umum dengan melakukan pendekatan seleksi, identifikasi, dan kalsifikasi masalah yang ada dalam suatu wilayah pedesaan.

Pengumpulan data melalui (1) *Brainstorming* untuk menampung berbagai aspirasi, ide, dan saran. (2) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas suatu masalah secara terfokus; (3) *Participatory Decision Making* (PDM) untuk melakukan pengambilan keputusan (Huraerah 2011). Lokasi penelitian ditentukan di Desa Sebus dan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, pertimbangannya selain sebagai daerah pesisir dan perbatasan dengan Serawak Malaysia, juga sebagai daerah yang memiliki potensi besar sebagai desa wisata.

Menggunakan purposif sampling untuk menentukan informan atau subjek penelitian yang dipilih atas pertimbangan peneliti bahwa informan atau subjek penelitian dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan penelitian yaitu aktivis pelopor dan penggiat pemberdayaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok usaha, akademisi dan pengunjung wisata. Data dianalisis melalui analisis SWOT dengan faktor internal: *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sebagai faktor eksternal : *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). (Rangkuti, 2014) dan (Fatimah 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai" karena mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya sering di lewati kapal untuk berlayar, merupakan kawasan berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia, dan Kabupaten Sambas masih menjadi salah satu daerah tertinggal menurut laporan dari Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2017. Menurut Salim (2011) menggunakan analisis spasial, Kabupaten Sambas termasuk daerah wilayah yang memiliki tingkat pembangunan sumber daya manusia, sosial dan bidang

pertanian yang rendah. Sarosa (2011) menyatakan sebagian besar daerah di perbatasan merupakan daerah miskin dan tertinggal, namun perhatian lebih menekankan pada bidang keamanan.

Kabupaten Sambas memiliki desa di ujung batas barat pulau Kalimantan yaitu Laut Natuna dan wilayah utara berbatasan langsung dengan Serawak Negara Malaysia yaitu Desa Temajuk yang dibentuk pada tahun 2002 dari pemekaran Desa Sebusus. Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha, sekitar 20,12% dari luas Kecamatan Paloh, terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan memiliki panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km. Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumentasi monografi Desa Temajuk tahun 2018 bahwa keunikan dan daya tarik Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, selain sebagai daerah pesisir dan perbatasan juga sebagai daerah yang memiliki potensi besar sebagai kunjungan atau tujuan wisata, sehingga menjadi Desa Wisata. Wisata yang ditawarkan adalah objek wisata alam flora dan fauna, kawasan wisata Mangrove dan konservasi Penyu, monumen Tugu Garuda, Batu Nenek, Batu Bajulang, Hutan Bakau, Air Terjun Gunung Pangi, terumbu karang, Dermaga Camar Bulan, dan wisata bahari dengan wisata pantai yang beragam seperti pantai Surya, pantai Maludin, Teluk Atong, Pasir Plaik, dan Tanjung Datok. Desa Temajuk dengan luas wilayah 2.310 ha dan pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 1.835 jiwa. Sumber pencaharian masyarakat di Desa Temajuk umumnya nelayan, pekerja kayu dan bangunan, petani dan buruh tani perkebunan karet dan kelapa, petani perkebunan lada serta kawasan pariwisata pantai. Kemudian tingkat pendidikan umumnya Sekolah Dasar (51,40%); SLTP (22,15%); SLTA (24,42%); Perguruan Tinggi (2,03%).

Problematika yang masih di hadapi di Desa Temajuk diantaranya yaitu infrastruktur akses jalan kendaraan masih kurang mendukung di penyebarangan Sungai Sekura Kecamatan Paloh ke Desa Sebusus sudah beraspal tetapi rusak parah karena banyak jalan yang rusak, berbatu dan amblas yang disebabkan banyaknya kendaraan truk dengan bermuatan berat mengangkut kelapa sawit untuk di kirim ke pabrik pengolahan. Kemudian dari penyebrangan Ceremai ke Desa Tamajuk akses jalan masih keadaan tanah atau tidak beraspal mengakibatkan jalan akan licin dan amblas jika terjadi hujan, sehingga sulit

dilewati. Akses menuju Desa Temajuk hanya dapat di lewati pada pagi sampai sore hari, jika sudah menjelang malam tidak bisa dipergunakan karena pencahayaan jalan tidak ada. Akan tetapi tahun 2018 sedang dalam proses pelebaran akses jalan hingga 10 meter.

Sedangkan akses jalan perbatasan dari pintu masuk Melano Serawak Malaysia lebih dekat dan lebih bagus akses jalannya ke Desa Temajuk yaitu sekitar 1 km dibandingkan akses jalan dari Desa Sebusus yang jaraknya kurang lebih 16 Km dan akses jalan yang masih tanah atau belum beraspal. Pada Desa Temanjuk akses jalan menuju tempat wisata khususnya ke Teluk Atong masih mengalami kesulitan karena jalan menurun dan menanjak sangat curam serta licin jika dalam keadaan hujan. Kecuali menggunakan kendaraan roda dua yang melewati jalur pinggir pantai lebih mudah jika dalam keadaan air pantai sedang surut. Kendala lainnya yaitu penerangan listrik di jalan belum dapat dipergunakan, bahkan di tempat wisata Teluk Atong masih mengandalkan genset untuk menerangi lokasi wisata.

Namun di Desa Temajuk memiliki banyak potensi wisata, terutama lokasi pantai yang sangat indah, masih alami dengan pasir putihnya, batu pantai, jernihnya air laut dan pemandangannya. Potensi kuliner makanan khas dari hasil tangkap ikan yang masih segar dan banyak pilihan di pasar ikan Camar Bulan yang juga sebagai tempat interaksi dan transaksi masyarakat Melano Serawak Malaysia untuk membeli ikan baik menggunakan uang ringgit Malaysia maupun rupiah. Terkadang masyarakat Temajuk seringkali membeli kebutuhan harian seperti minyak goreng, gula, beras, dan gas untuk bahan bakar ke wilayah Melano Malaysia karena harganya lebih terjangkau dan akses jarak lebih mudah serta dekat. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk melakukan penelitian di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas khususnya tentang membuat strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir perbatasan untuk ketahanan sosial dan penguatan ekonomi. Sebagaimana menurut Huruswati *et al.* (2012) program pembangunan seharusnya lebih difokuskan pada percepatan pembangunan daerah yang kondisi sosial, budaya ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Sehingga membutuhkan pendekatan atau strategi pembangunan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sutaat (2012) menegaskan bahwa masyarakat mengakses pelayanan publik umumnya masih terbatas, kemudian kurangnya kemampuan mengelola pertanian dan perkebunan dan masih

terbatasannya infrastruktur fisik serta permasalahan kesejahteraan sosial. Gevisioner *et al.* (2013) menyatakan pembangunan wilayah perbatasan pesisir sebaiknya dengan pendekatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan ekologi yang terpadu dan berkelanjutan berdasarkan kepentingan serta potensi masyarakat.

Penelitian memiliki proses tahapan kegiatan, diantaranya peneliti melakukan (1) Studi pendahuluan tahun 2017-2018 tentang pembangunan dan pemberdayaan di wilayah perbatasan pesisir, yaitu (a) Melakukan kajian literatur dari jurnal ilmiah dan hasil riset, kajian media massa baik media cetak dan online. (b) Melakukan diskusi dengan praktisi dan ahli tentang hasil kajian literatur, hasilnya dapat merumuskan permasalahan, tujuan, lokasi dan metode penelitian. (c) Menyusun dan mengusulkan rencana penelitian. (2) Merancang dan melaksanakan agenda penelitian Januari 2018 seperti (a) Melakukan diskusi dengan tim penelitian dan kolega khususnya informan kunci. (b) Menentukan instrumen dan informan penelitian serta jadwal kegiatan. (c) Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan penelitian. (3) Melaksanakan penelitian pada Februari-April 2018 dengan kegiatan (a) Membuka akses dan mengajukan perijinan ke lokasi riset melalui informan kunci, (b) Melakukan wawancara mendalam dan dialog dengan informan yaitu aktivis penggiat pemberdayaan, tokoh masyarakat, pemerintahan desa terutama kepala desa dan perangkat desa, pemuda dan masyarakat yang menjadi kelompok usaha ekonomi dan pariwisata serta pengunjung. (c) Melakukan pengamatan langsung dengan berkunjung ke lokasi kegiatan ekonomi dan tempat wisata. (d) Mengolah dan menganalisis data dokumentasi serta hasil penelitian. (e) Melakukan klarifikasi dan verifikasi data dengan informan. (f) Mengolah dan menganalisis data untuk membuat laporan penelitian dan artikel ilmiah.

Pelaku dan penggiat pemberdayaan yang memiliki semangat, ide, inisiasi, memiliki akses dan dapat berinteraksi, mendesiminasi, memfasilitasi serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan program pemberdayaan. Komunikator pemberdayaan berasal dari aktivis pemuda pelopor penggiat pemberdayaan yang berasal dari beberapa orang pemuda yang memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi untuk memajukan Desa Sebus dan Desa Temajuk yang sebelum tahun 2002 masih dalam satu desa yaitu Desa Sebus. Komunikator pemberdayaan dipelopori oleh Darmawan sebagai ketua kelompok Kalilae, sebagai aktivis pemuda yang memiliki latar belakang mendapatkan pendidikan di

perguruan tinggi atau sarjana dan pengalaman aktif di organisasi, memiliki idealisme, kemampuan komunikasi interpersonal, akses dan kerjasama yang baik dengan pihak lain, sehingga berani untuk memperjuangkan ide dan pelaksanaan program pemberdayaan. Kemudian bekerjasama dengan aktivis pemuda Gustian sebagai Ketua Kelompok Gapoktan Camar Bulan serta para pemuda lainnya yang ikut bergabung bersama beberapa tokoh masyarakat yang memiliki semangat dan tujuan yang sama memajukan desa.

Aktivis pemuda pelopor pemberdayaan merupakan aset penting dalam pembangunan di desa, di tengah-tengah pemuda banyak yang meninggalkan desa dan generasi petani semakin sedikit karena lebih menilai mencari nafkah di kota (urbanisasi) lebih menjamin kesejahteraan. Sehingga adanya kesadaran dan semangat yang tinggi dari aktivis pemuda pelopor penggiat pemberdayaan sebagai langkah awal yang baik untuk melaksanakan pembangunan melalui berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki desa baik dari sumber daya pertanian, perikanan, dan pariwisata. Karena menurut Gustina (2007) generasi muda memiliki banyak akses komunikasi yang digunakan, karena rasa ingin tahu kaum muda cenderung lebih besar terhadap suatu informasi. Susanti (2009) dan Purwatiningsih (2012) menyatakan pemikiran dan partisipasi dari tokoh pemuda biasanya melahirkan ide baru (inovasi) dan lebih mewarnai dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

Aktivis pelopor penggiat pemberdayaan dapat disebut *opinion leader* yang dapat mempengaruhi dan mengajak para pemuda lainnya sekaligus beberapa tokoh masyarakat yang peduli pada perkembangan pembangunan di desa. *Opinion leader* memiliki ciri yaitu lebih tinggi status pendidikan formal, pengenalan medinya, kosmopolit dan pengalamannya, memiliki kemampuan empati, partisipasi sosialnya lebih besar, dan inovatif dalam menerima serta mengadopsi ide baru (Nurudin 2005; Iqbal 2007; Badri *et al.* 2008).

Kemudian terdapat pelaku pemberdayaan dari tokoh masyarakat yang berprofesi sudah lama menjadi petani, nelayan dan pedagang serta mantan pegawai pemerintah desa yang bergabung dengan aktivis pelopor penggiat pemberdayaan. Aktivis pemberdayaan dari tokoh masyarakat tersebut memiliki pengalaman dan sangat mengenal permasalahan serta potensi desa. Aktivis pemuda merupakan kelompok generasi muda yang meneruskan pekerjaan orang tuanya di desa sebagai petani, nelayan dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Aktivis pemuda pelopor sebagai komunikator pemberdayaan yang didukung oleh tokoh masyarakat dan pemuda desa merupakan motor penggerak dalam

pembangunan di desa secara bertahap, dan dapat disebut sebagai komunitas penggerak pembangunan atau *community development*. Menurut Ife dan Tosoriero (2008) *community development* merupakan proses memfasilitasi pembentukan kembali struktur masyarakat sebagai cara baru untuk mengorganisasikan kehidupan sosial dalam memenuhi kebutuhan, mengerahkan sumber daya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri. Hasim dan Remiswal (2009) menyatakan *community development* sebagai suatu strategi dalam pembangunan sosial yang dilakukan warga komunitas untuk bekerjasama untuk meraih masa depan komunitas itu sendiri.

Namun aktivis penggiat pemberdayaan sebagai *opinion leader* dan *community development* tersebut kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa baik kebijakan program dan anggaran. Sehingga peran *community development* baru pada tahap individu, keluarga dan kelompok kecil, belum bisa masuk pada pihak organisasi pemerintah desa dan masyarakat keseluruhan. Sebagaimana menurut Suharto (2007) *community development* atau pengembangan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dan metode pekerjaan sosial yang unik dan melibatkan penanganan permasalahan dari dua tingkatan yaitu pada individu, keluarga, dan kelompok (tingkat mikro), kemudian pada organisasi dan masyarakat (tingkat makro). Fokus *community development* pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional dirancang untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas.

Kurangnya dukungan dari pemerintah desa terhadap *community development*, disebabkan luasnya wilayah yang dimiliki Desa Sebusus yaitu 326,21 Km² atau 32,6 hektar dan Desa Temajuk seluas 2,3 hektar. Program pembangunan masih cenderung untuk kebutuhan pemerintahan dan administrasi serta pembangunan material atau fisik, sedangkan untuk program pemberdayaan masih sedikit. Kemudian partisipasi masyarakat khususnya dalam membuat perencanaan pembangunan umumnya kurang aktif dan memiliki keberanian untuk beraspirasi, masyarakat lebih cenderung menyibukkan dirinya melakukan aktivitas rutin mencari nafkah dengan bertani, menjadi nelayan dan buruh tani. Komunikator pemberdayaan sebagai *opinion leader* dan *community development* sudah melakukan dialog atau komunikasi secara personal dan komunikasi kelompok baik secara informal maupun secara formal dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa

tentang pentingnya program pemberdayaan ekowisata yaitu konservasi dan wisata magrove, budidaya madu Kelulut di kawasan magrove, serta usaha pengolahan buah mangrove, namun belum berhasil menjadi perhatian utama program pembangunan desa. Sekalipun ada kegiatan pemberdayaan sekaligus bantuan yang dilakukan dari dinas pertanian serta dinas kelautan dan perikanan kabupaten, namun hanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan, tetapi belum maksimal dari segi pendampingan dan kemitraan. Sehingga program pemberdayaan tidak ada keberlanjutan dan tidak memiliki dampak positif kepada masyarakat. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan. Begitupun menurut Flamin dan Asnaryat (2013), Haryanto (2014) dan Karlina (2015) bahwa dalam pengelolaan ekowisata membutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta.

Terdapat aktivis pemberdayaan dari luar masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat internasional non pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) dari *World Wide Fund* (WWF) yang melakukan aktivitas penanggulangan masalah riset, konservasi, dan restorasi lingkungan. WWF melakukan riset dan pemberdayaan tentang konservasi mangrove serta pelestarian penyu di Desa Sebusus dan Desa Temajuk Kecamatan Paloh. Namun WWF belum kurang memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan serta belum dapat bekerjasama secara berkesinambungan dengan aktivis pemberdayaan lokal. WWF melibatkan aktivis pemberdayaan dan masyarakat lokal hanya untuk menunjang kegiatan serimonial dan publikasi hasil kegiatannya. Seharusnya WWF yang memiliki sumber dana, sumber daya, program dan akses yang lebih kuat dapat memberdayakan aktivis pemberdayaan dan masyarakat setempat supaya dapat meningkatkan kompetensi sebagai *community development*. Idealnya komunikator pemberdayaan dapat bersinergi untuk melakukan program bersama dalam memajukan potensi Desa Sebusus dan Desa Temajuk antara aktivis penggiat pemberdayaan dari pemuda dan tokoh masyarakat serta WWF sebagai *civil society* dengan pemerintah setempat mulai dari desa dan kabupaten, termasuk

dari pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas. Pihak pemerintah desa dan daerah membuat kebijakan pembangunan dengan cara memberikan kesempatan yang lebih terbuka (demokratis) untuk masyarakat dalam hal ini para aktivis penggiat pemberdayaan sebagai *civil society* dalam memberikan aspirasi dan partisipasi sesuai permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki. Pemerintah dengan dinas terkait memprioritaskan program pembangunan melalui pemberdayaan untuk dapat peningkatan sumber daya manusia baik semangat, kepedulian, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian, serta sumber potensi alam dan ekonomi masyarakat. Aktivis pemberdayaan dapat menjadi fasilitator, instruktur, pendamping dan mitra dalam program pemberdayaan baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. Kemudian pihak swasta mendukung kebijakan dan program pemberdayaan yang telah disepakati dengan mengimplementasikan kewajibannya melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Kewajiban swasta melaksanakan CSR terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1(3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penegasan adanya sinergitas antara pemerintah, *civil society* dan swasta dalam pembangunan, sebagaimana menurut Nugroho (2003), Sumarto (2004), Dwiyanto (2005), dan Christian (2016) bahwa pembangunan dilaksanakan tidak sekedar menjadi tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan peran dan kerjasama berbagai aktor lain yaitu masyarakat (*civil society*) dan swasta.

KESIMPULAN

Desa Temajuk memiliki banyak potensi pantai dan hasil ikan, sedangkan Desa Sebusus memiliki potensi hutan mangrove, penangkaran penyu, olahan minuman dan makanan dari buah mangrove. Sehingga membutuhkan manajemen ekowisata yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.

Aktivis pemuda menjadi pelopor dan penggiat pemberdayaan ekowisata sekaligus *opinion leader* yang dapat mempengaruhi, bekerjasama dan memiliki idealisme dengan tokoh masyarakat untuk mengembangkan serta memajukan desa.

Infrastruktur jalan dari Kecamatan Paloh ke Desa Sebusus relatif bagus, kecuali setelah penyebrangan Sungai Sekura menuju Desa Sebusus keadaanya rusak karena sering dilalui mobilitas truk pengangkut kelapa sawit. Sedangkan Desa Temajuk masih memiliki permasalahan infrastruktur jalan, penerangan listrik dan sinyal telekomunikasi.

Pemberdayaan ekowisata belum dijalankan berkesinambungan, serta belum menjadi prioritas bagi pembangunan di desa dan kemitraan dari swasta, sehingga para aktivis penggiat pemberdayaan baru mendapat penyuluhan, pelatihan, dan studi banding tetapi kesulitan untuk mengembangkan, karena belum maksimalnya program pendampingan dan kemitraan..

Akses jalan wilayah perbatasan dari Melano Malaysia ke tempat wisata Desa Temajuk lebih dekat, mudah dan bagus untuk dilalui, sehingga masyarakat juga masih memiliki ketergantungan untuk bekerja menjadi petani, buruh dan tukang kayu di Malaysia, termasuk memenuhi kebutuhan seperti minyak goreng, beras dan gas bahan bakar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi IR. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Amanah S. 2010. Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 8(1): 1-19
- Arifin, S. 2011. Migrasi Penduduk dan Implikasinya Terhadap Hankam di Wilayah Perbatasan Kalbar-Serawak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 40(2):220-227
- Arifin, S. 2013. Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 1(20): 37-58
- Aryunda, H. 2011. Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 22(1): 1-16
- Aulia,A.N., & Hakim, L. 2017. Pengembangan Potensi Ekowisata Sungai Pekalen Atas, Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 5(3): 156-167

- Bappenas-BNPP. 2010. Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Decentralization Support Facility (DSF) BAPPENAS – BNPP- PT.Pillar Pusaka Inti. Jakarta
- Badri M, Hubeis M, Maksum. 2008. Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 6(1): 55-71
- Buddenhagen RW, Baldwin JR. 2011. Performing communicative functions in development projects: An exploratory study of development practices in Tanzania. *International Journal of Intercultural Relations*. 36(3):418–429.
- Cindoswari AR. 2012. Jaringan Komunikasi dalam Penerapan Teknologi Produksi Ubi Kayu [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Christian, R. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik dalam pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Adminitrasi Negara*. 4 (2) : 2781 - 2794
- Daniel M., Darmawati.,& Nieldalina. 2008. *Participatory Rural Appraisal (PRA): Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press
- Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fatimah, F.N.D. 2017. *Teknik Analisis SWOT: Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Pengelola Kekuatan dan Ancaman*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Flamin, A., & Asnaryati. 2013. Potensi Ekowisata dan Strategi Pengembangan Tahura Nipa-Nipa Kota Kendari Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallace*. 2(2): 154-168
- Gevisioner, Rindukasih Bangun, Karyanti. 2013. Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. *Jurnal Bina Praja*. 5(1): 53 - 62
- Gustina A. 2007. Jaringan Komunikasi dan Peran Perempuan dalam Mempertahankan Budaya Rudat; Studi Pada Masyarakat Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Lampung Selatan. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Haryanto, J.T. 2014. Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY. *Jurnal Kawistara*. 4(3): 225-330
- Hasim dan Remiswal. 2009, *Community Development : Berbasis Ekosistem : Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Diadit Media

- Hijriati, E., & Mardiana, R. 2014. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi.
- Huraerah A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Idris, I & Sijabat, S. 2013. Model Peningkatan Peran KUMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Pengkajian Koprasi dan UKM*. 6(1):89-123
- Ife, J., & Tesoriero, F., 2008. *Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalization*. 2006. Australia (AU): Pearson Education
- Indarti, I & Wardana, D.S. 2013. Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelambagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*.17(1):75-88
- Iqbal M. 2007. Analisis Peran Stakeholder dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor (ID). 26(3): 89-99
- Karlina, E. 2015. Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kawasan Pantai Tanjung Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 12(2): 191-208
- Karsudi., Soekmadi, R.,& Kartodihardjo, H., 2010. Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 16(3): 148-154
- Koswara. 2010. Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Kristiyanti, M. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai melalui Pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zoe Manajement*). *Prosiding*. Seminar Nasional: Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global. Unisbank Semarang, 28 Juli 2016: 752-760
- Kusumedi, P., & Rizal, A.H.B. 2010. Analisis Stakeholders dan Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 179-193
- Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2016. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- Leeuwis C. 2006. *Communication for Rural Innovation : Rethinking Agricultural Extension*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
- Littlejohn SW, Foss KA. 2008. *Theories of Human Communication 9th*. Singappre: Cengage Learning
- Luthfia, A.R. Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2): 135-143
- Mahmud A. 2007. Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak). [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro
- Muhammad A. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta (ID): Bumi Aksara
- Mardikanto T. 2010. *Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Komunitas akademis, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta (ID): UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS Pr
- Nurcholis H, Milwan T, Warsono H. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta (ID): Grasindo
- Nugroho, N.D., 2004. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Elex Media Komputendo
- Nurudin. 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Pambudy, R. 2009. Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. *Prosiding Seminar Nasional*. Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat. Kamis, 19 November 2009. IPB *International Convention Center* (IPB ICC) Bogor (ID): 67-77
- Patriadi, H.B, 2010. Isu Perbatasan : Memudarnya 'Imagined State?', dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purnaningsih, N. 2009. Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Sosial pada Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. IPB. 3(3): 379-394
- Purwatiningsih SD. 2012. Efektivitas Komunikasi Pembangunan pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Ramirez A. 2013. The Influence of Social Networks on Agricultural Technology Adoption. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 79:101-116

- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Reinwald, A., & Kraemmergaard, P. 2012. Managing stakeholders in transformational government - A case study in a Danish local government. *Government Information Quarterly*. GOVINf-00813:1-9
- Salahuddin. 2012. Pengaruh Komunikasi Interaksional Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kota Kendari. *Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi*. 3: 70-78
- Salakory, R.A. J. B. 2016. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Agrika*. 10(1): 84-92
- Satries WI. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan*. 2(2): 89-130
- Sholihah, I. 2016. Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi. *Rechts Vinding*. 5(3): 305-321
- Solaiman, N.F. 2013. Responsifitas Pemerintah dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Desa Longpujungan Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau). *eJournal Pemerintahan Integratif*. 4(1): 450-463
- Sudarmayanto. 2012. *Good Governance : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Suharto. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Bandung : Refika Aditama
- Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. 2016. Merancang Media Informasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. *Kawistara*. 6(1): 93-106
- _____, A.I., Kuncoro, B., Sulistyoningsih, E.D., Nuraini, H., Djawahir, F.S. 2017. Pengembangan Agrowisata Berbasis Ketahanan Pangan Melalui Strategi Komunikasi Pemasaran di Desa. *The Messenger*. 9(1):9-25
- Sumarto HS. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta ID: Yayasan Obor Indonesia